

## DAMPAK COVID-19 TERHADAP BIRO PERJALANAN DAN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

**EDI HASKAR**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
edihaskar28@gmail.com

**Abstract:** *The Covid 19 outbreak has had a major impact on the world economy, where Indonesia is also experiencing it. With the limitation of all activities, it is very influential on economic stability. One of the economic aspects affected is the activities of the Travel Bureau and Hajj and Umrah Organizers. Where this Travel Bureau has been affected because of the absence of a permit for Hajj and Umrah services given by the Government of Saudi Arabia, to break the chain of the spread of Covid 19. With the cancellation of the departure of the Hajj and Umrah pilgrims, the travel agency also suffered losses, as well as concerns about the survival of its business. . However, some travel agencies carry out a strategy to survive by doing other types of business that can at least help sustain the business, such as carrying out export and import activities.*

**Keywords:** *Covid 19, Impact, Travel Agency.*

**Abstrak:** Wabah Covid 19 sangat memberikan dampak besar terhadap perekonomian dunia, dimana Indonesia juga mengalaminya. Dengan terbatasnya segala kegiatan, maka sangat berpengaruh terhadap kestabilan perekonomian. Salah satu aspek perekonomian yang terdampak adalah kegiatan Biro Perjalanan dan Penyelenggara Haji dan Umrah. Dimana Biro Perjalanan ini menjadi terdampak karena tidak adanya izin pelayanan haji dan umrah yang diberikan oleh pihak Pemerintah Arab Saudi, untuk memutus rantai penyebaran Covid 19. Dengan pembatalan keberangkatan Jemaah Haji dan Umrah, maka biro perjalananpun mengalami kerugian, dan juga kekhawatiran terhadap keberlangsungan hidup usahanya. Tetapi beberapa biro perjalanan melakukan strategi agar dapat bertahan hidup dengan melakukan jenis usaha lain yang setidaknya dapat membantu mempertahankan usaha seperti melakukan kegiatan ekspor dan impor.

**Kata kunci:** Covid 19, Dampak, Biro Perjalanan.

### A.Pendahuluan

Sejak akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan wabah penyakit Covid 19. Dimana Indonesia juga termasuk Negara yang terdampak virus corona. Virus Corona yang berasal dari Wuhan, China ini begitu cepat menyebar di daerah-daerah di Indonesia. Virus ini dibawa oleh warga yang pulang bepergian dari luar negeri, dan juga warga Negara asing yang masuk ke Indonesia. Virus Corona yang menyebar di Indonesia memberikan dampak yang begitu besar terhadap sektor-sektor vital Negara, terutama perekonomian Negara. Salah satu yang terdampak yaitu biro perjalanan haji dan umrah.

Dengan menyebarnya virus corona di Indonesia dan Negara-negara lainnya, Pemerintah Arab Saudi mengambil keputusan untuk tidak menerima jama'ah yang akan melaksanakan Haji dan Umrah. Sehingga seluruh jamaah yang telah mendaftar maupun yang akan mendaftar untuk melaksanakan haji dan umrah akan diundur jadwal keberangkatannya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menerbitkan keputusan Menag RI Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan

Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H 2021 M. Dengan pembatalan ibadah haji dan umrah sangat berdampak kepada operasional Biro perjalanan Haji dan Umrah. Dengan ini, makalah ini akan membahas bagaimana dampak Covid 19 terhadap Biro Perjalanan dan Penyelenggara Haji dan Umrah, dan juga bagaimana strategi Biro Perjalanan Haji dan Umrah dalam menghadapi pandemic Covid 19.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari dan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literature berupa buku dan artikel, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas masalah serupa. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Biro Perjalanan dan Penyelenggara Haji dan Umrah**

Saat ini, dunia digemparkan dengan adanya virus Covid 19 yang mana hampir menyebar keseluruh Negara yang ada di dunia. Indonesia merupakan salah satu Negara yang terdampak virus Covid 19. Dengan adanya virus Covid 19 ini, begitu banyak sector-sektor vital Negara yang terdampak, salah satunya perekonomian Negara. Adanya penutupan akses layanan penyelenggaraan haji dan umrah dari Pemerintah Arab Saudi, maka pemerintah Indonesia membuat keputusan untuk mengundur kembali keberangkatan jamaah haji dan umrah tahun ini.

Adapun keputusan tersebut tertuang dalam keputusan Menag RI Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H 2021 M. Menteri Agama Yaqut Cholil Qousman mengatakan bahwa ada beberapa pertimbangan Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini, yaitu: a) Bahwa menunaikan ibadah haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik, serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan dan di Arab Saudi; b) Bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji sebagaimana dimaksud pada huruf a terancam oleh pandemi COVID-19 beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi; c) Bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, melalui upaya penanggulangan pandemi COVID-19; d) Bahwa dalam ajaran Islam, menjaga jiwa adalah salah satu dari lima maqashid syariah, selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat; e) Bahwa sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dalam skala lokal dan global, pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau 2021 Masehi; f) Bahwa Pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau 2021 Masehi dan pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan yang pelayanan bagi jemaah haji; g) Bahwa setelah mempertimbangkan keselamatan

jemaah haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan yang diambil oleh otoritas Arab Saudi, Komisi VI DPR RI dalam rapat kerja masa persidangan ke 5 tahun sidang 2020/2021 tanggal 2 Juni 2021 menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil oleh pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau 2021 Masehi; dan h) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan keputusan menteri agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah/2021 masehi.

Pembatalan keberangkatan jemaah haji yang sudah terjadi 2 kali ini, maka sangat berpengaruh terhadap perekonomian Negara, salah satunya sangat berpengaruh terhadap biro perjalanan dan penyelenggara haji dan umrah yang sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan haji dan umrah. Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Penyelenggara Haji, Umrah dan In-Bound Indonesia (Asphurindo), KH. Hafids Taftazani mengatakan, travel haji dan umrah menjadi perusahaan yang paling terdampak dimasa pandemi Covid 19 ini. Dengan kembali tidak diberangkatkannya jemaah haji dan umrah pada tahun 2021 ini, maka semakin besar kerugian yang di alami oleh Biro Perjalanan dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Untuk tahun 2020, Biro Perjalanan dan Penyelenggara Haji dan Umrah diperkirakan akan kehilangan pendapatan sekitar 123 juta dolar AS atau Rp 1,84 triliun dari batalnya pemberangkatan jemaah haji Indonesia. Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi kepada Tempo.co tanggal 6 Juni 2021 mengatakan “Rata-rata per travel haji Rp 5 miliar setahun kesempatan untuk bisa mendapatkan itu hilang, dengan tidak adanya haji 2 tahun ini.”

Hafids Taftazani juga mengatakan bahwa saat ini Biro Perjalanan dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah hanya bertahan dengan tabungan yang dimiliki, dan juga sebagian dari Biro-biro yang ada sudah mulai melakukan perumahan karyawan dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Syam kepada Tempo.co mengatakan bahwa dengan pembatalan keberangkatan haji, dan umrah, pendapatan tiap biro perjalananpun hilang, sementara mereka tetap harus membayar biaya operasional pokok yang berjalan. Ia juga menyampaikan bahwa jika ingin bertahan maka harus dilakukan efisiensi.

## **2. Strategi Biro Perjalanan Haji dan Umrah dalam Menghadapi Pandemi Covid 19**

Kondisi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) pun terus memburuk usai menghadapi pembatalan keberangkatan jemaah haji dan umrah. Mereka tetap harus memikirkan biaya operasional ditengah tidak adanya pendapatan yang mereka dapatkan. Saat ini, beberapa perusahaan dapat bertahan dengan tabungan yang mereka miliki. Banyak juga diantaranya sudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawainya. Karena tidak semua bisa bertahan dengan menggeser strategi bisnis. Beberapa perusahaan bisa menyikapi permasalahan pandemic ini dengan bijak, yaitu dengan menggunakan manajemen resiko yang telah dibuat sebelumnya. Manajemen resiko ini penting ada dalam sebuah perusahaan untuk mengenali resiko dalam sebuah usaha, dan juga untuk mengurangi dan menghindari resiko yang ada, dan untuk memaksimalkan peluang yang ada.

Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Firman M.Nur mengatakan banyak biro perjalanan dan penyelenggara haji dan umrah beralih ke bisnis kuliner, selain itu ada juga yang merambah bisnis

perdagangan termasuk ekspor dan impor. Sejumlah biro perjalanan dan penyelenggara haji dan umrah juga menjalankan diversifikasi usaha dengan menjadi importer kurma, penjualan sepeda, hingga bisnis tour dan travel domestic.

Sejumlah strategi lain juga dilakukan untuk bisa tetap bertahan yaitu melalui pemerintah. Para pihak biro Perjalanan Haji dan Umrah juga meminta pemerintah untuk bisa melobi dan memfasilitasi pemberangkatan Jemaah, setidaknya untuk kegiatan Umrah saja. Dan tentunya jika diberikan izin untuk melaksanakan ibadah umrah, nantinya akan menerapkan ketentuan protocol kesehatan yang sesuai standar. Para biro penyelenggara haji dan umrah juga meminta pemerintah untuk memberikan insentif. Untuk bagian administrasi, pemerintah diminta untuk memberikan keringanan perpanjangan izin, sertifikasi dan akreditasi. Kemudian yaitu pemberian insentif lunak. Dan juga pemerintah diminta untuk bisa memfasilitasi pengembalian dana yang sudah didistribusikan biro kepada pihak-pihak terkait, salah satunya maskapai penerbangan.

#### **D.Penutup**

Pembatalan keberangkatan Jemaah Haji dan Umrah dalam melaksanakan kegiatan Haji dan Umrah pada masa pandemic Covid 19 ini sangat memberikan dampak yang besar terhadap operasional Biro Perjalanan dan Penyelenggara Haji dan Umrah. Dimana Biro Perjalanan dan Penyelenggara Haji dan Umrah mengalami kerugian, dan ini menyebabkan tidak berjalannya operasional biro perjalanan. Sebagian dari biro perjalanan juga ada yang tidak dapat bertahan dan juga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Dengan adanya kerugian yang didapat oleh Biro Perjalanan dan Penyelenggara Haji dan Umrah, maka beberapa Biro Perjalanan membuat strategi diantara yaitu, melakukan kegiatan usaha lain seperti melakukan kegiatan ekspor dan impor, seperti mengimpor kurma dan juga membuka bisnis tour dan travel domestic. Kemudian juga meminta kepada pemerintah untuk menjadi fasilitator baik terhadap pihak Arab Saudi, dan juga memberikan insentif untuk keberlangsungan hidup usaha Biro Perjalanan dan Penyelenggara Haji dan Umrah.

#### **Daftar Pustaka**

- Alfiah, Lailatussani. "Strategi Adaptasi Perusahaan Bito Tour And Travel Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Akademika:Jurnal Keagamaan dan Pendidikan* Vol.16 No.2 (2020), 113-127.
- Budiyanti, Eka. "Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan Dan Pariwisata Indonesia." *Info Singkat XII*, No.4 (2020): 19-24.
- David, Fred R. *Strategic Managemen Concept And Cases*, 2015.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. "Musim Haji Di Tengah Pandemi." *INSIGHT Slamic Economy Bulletin*.
- Kusumawardhani.(2019). Analisis Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2009 Pada Model Optimasi Pengembangan Destinasi Wisata Spiritual.10, 28-39.
- Permadi, Muhammad." Analisis Manajemen Resiko PT. Amanu Zamzam Sakinah Solo Menghadapi Kebijakan Pemerintah di Masa PANDEMI Covid-19." *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* Vol. 4 No.2 (2020)
- <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/07/jemaah-haji-batal-berangkat-biro-travel-haji-kini-jualan-kurma-menanti-stimulus-pemerintah?page=4>
- <https://www.dw.com/id/fakta-fakta-di-balik-batalnya-keberangkatan-haji-2021/a-57774344>

<https://fokus.tempco.co/read/1469486/pembatalan-haji-2021-pupusnya-penantian-jemaah-dan-tekanan-bagi-travel>

<http://www.PerindunganIndustriPariwisatadanTravelHajidanUmrahPadaPandemiCovid19>

<http://www.StrategiAdaptasiPerusahaanBiroTourdanTravelHajiUmrahPadaPandemiCovid19>